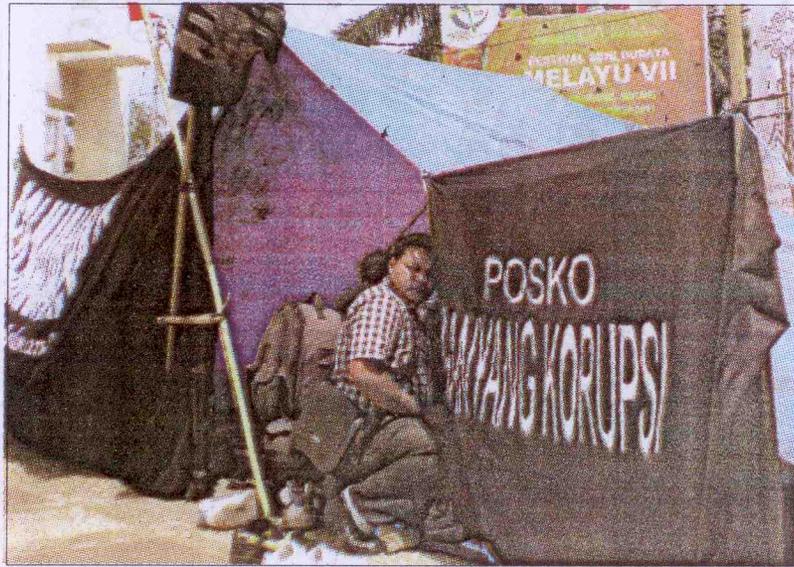


Kamis, 8 Desember 2011

Penanganan Kasus Korupsi Lemah



Solmadapar bangun posko Ganyang Korupsi di bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura.

FOTO DELI

Pontianak, BERKAT.

Kelompok massa tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar)

membangun posko "Ganyang Korupsi", Selasa (6/12) malam, di bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura. Aksi sebagai bentuk seruan ke masyarakat bah-

wa penanganan kasus korupsi di Kalbar masih jalan di tempat.

"Kita mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi. Bahkan, 68 kasus korupsi lama di Kalbar yang diangkat kembali Kejati hingga kini belum ada kejelasan," ujar Anton, sekjen Solmadapar, kemarin.

Menurut dia, lemahnya kinerja aparat penegak hukum akibat keterbatasan sarana, prasarana dan dana hanya sebuah alasan. Kondisi ini mengakibatkan proses hukum terkesan berjalan lamban. Bahkan, kasus tipikor yang menyeret oknum kepala daerah tidak mampu dibawa ke proses

LANJUTAN BACA HAL 11

Penanganan Kasus Korupsi Lemahdari Hal 1

persidangan.

"Padahal fakta hukumnya, kepala daerah terlibat dapat dijerat. Jangankan untuk di meja hijau, yang sudah tervonis juga masih bisa bebas," katanya.

Seperti kasus korupsi pengadaan baju hampis di Kesbanglinmas Provinsi Kalbar. Untuk tahun anggaran 2008 berindikasi kerugian daerah Rp 2.239.690.900 dan tahun anggaran 2009 berindikasi kerugian daerah Rp 2.425.823.250. Dimana kasus turut melibatkan oknum pejabat SKPD.

"Sebenarnya sesuai inpres nomor 5/2005 upaya hukum harus dipercepat," ungkap Anton.

Ia menyatakan, contoh lain seperti kasus korupsi di kabupaten Sanggau yakni pengadaan obat cacang untuk 54 ribu SD di kabupaten itu. Audit BPK menyebutkan dan menyimpulkan telah terjadi kerugian Rp 7,1 miliar.

"Kasus ini telah ditangani Kejati sejak 2008 lalu. Mau nunggu apa lagi, segera limpahkan ke pengadilan agar jelas siapa

yang salah dan terlibat," tuturnya.

Maka, lanjut Anton, aksi seruan anti korupsi dilakukan agar masyarakat mengetahui lemahnya penanganan kasus korupsi di Kalbar.

Kegiatan dimaksudkan dalam rangka mencari dukungan dan perhatian masyarakat yang melintas di jalan Ahmad Yani. Agar turut mendukung dan mengangkat kasus korupsi di Kalbar.

"Kita berharap proses penanganan kasus korupsi di Kalbar agar dipercepat," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa posko ganyang korupsi akan berdiri selama satu minggu kedepan. Guna menyambut hari anti korupsi yang jatuh pada 9 Desember 2011, mendatang. Sebagai bentuk perlawanan, akibat lemahnya penanganan kasus korupsi.

"Per 31 Desember 2010, kerugian daerah yang belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 178 kasus dengan saldo Rp 156.050.046.632," ungkapnya. (del)